



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

RENCANA KERJA 2022

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang**

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.34 Pemalang – 52313

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, disamping memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025, Standar Pelayanan Minimal serta Rencana Awal Strategis Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang 2021-2026.

Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja serta kegiatan organisasi yang akan dicapai dalam periode penganggaran satu tahun.

Kami menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2022 ini masih dijumpai beberapa kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun diperlukan guna penyempurnaan perencanaan di masa yang akan datang.

Pemalang, Juli 2021

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
KABID JAKON CIPTATARU DPUTR**

SUPRIYANTO, ST, MA

Penata Tk. I

NIP. 19680110 198809 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PERUMAHAN DAN KAWAPERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: 050/1.106/ PERKIM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Disperkim Kabupaten Pemalang Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, Juli 2021

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
KABID JAKON CIPTATARU DPUTR

SUPRIYANTO, ST, MA
Penata Tk. I
NIP. 19680110 198809 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN.....	11
1.1. Latar Belakang.....	11
1.2. Landasan Hukum.....	14
1.3. Maksud dan Tujuan.....	18
1.4. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU.....	22
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	22
2.1.1. Urusan Wajib Perumahan	23
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26
2.2.1. Urusan Perumahan.....	26
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.....	46
2.3.1. Urusan Perumahan.....	48
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	60
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.....	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	64
BAB V PENUTUP.....	73

Lampiran : Peraturan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Pemalang
Nomor : 050 /1.106 / PERKIM/2021
Tanggal: 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah , yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang

tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah .

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2022. ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat daerah , sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya tahun 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi misi Pematang Jaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI"**

Misi :

1. Mewujudkan rasa aman , ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong

4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang, maka misi yang terkait adalah:

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2022, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Penyusunan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022, pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan target Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah RKPD Tahun 2022. Langkah tersebut dicapai sebagai pengejawantahan dari sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan nasional provinsi dan kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang -undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Kumuh
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga –Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang –Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemasang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No. 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2020 Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 129);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
39. Peraturan Bupati Pematang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 66);
40. Peraturan Bupati Pematang Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Urusan Tugas Jabatan Struktural Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 94);

41. Peraturan Bupati Pematang Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 66);
42. Peraturan Bupati Pematang Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 80);
43. Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 77);
44. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pematang tahun 2021-2026 .

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Tahun 2022 adalah agar dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dasar pada tahun ini, yang merupakan salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Bupati Pematang. Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas.
2. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Pematang Jaya diantaranya:

1. Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Pematang Jaya.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Disperkim Kabupaten Pematang Jaya selama lima tahun.
3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama satu tahun kedepan.
4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi Perangkat Daerah maupun antara Pusat dan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik antara lain memuat sebagaimana berikut:

1.1.Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, selain itu memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen Renja tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bab ini memuat hal-hal sebagaimana berikut:

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun lalu dan Capaian Renstra

2.1.1. Urusan Wajib Perumahan

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1. Urusan Wajib Perumahan

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

2.3.1. Urusan Wajib Perumahan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang adalah dokumen perencanaan tahunan yang antara lain memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi hasil terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2022, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/ kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2020, disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dicapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat, hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ada yang sampai tingkat output dan adapula

yang sampai pada tingkat outcome. Penyebabnya adalah bidang belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja out come untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat, hal ini disebabkan karena penyusunan basis data yang masih kurang dari masing-masing bidang. Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat adalah sebagaimana tersebut dalam table-tabel berikut.

2.1.1. Urusan Wajib Perumahan

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Bangunan-bangunannya berkondisi substandar atau tidak layak, dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Kawasan yang sesungguhnya tidak diperuntukkan sebagai daerah pemukiman, oleh penduduk miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap diakupasi untuk dijadikan tempat tinggal. Perkembangan capaian lingkungan pemukiman kumuh di Kabupaten Pematang Jaya dalam kurun waktu 2019-2020 seperti terlihat pada tabel berikut.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada urusan wajib perumahan dinilai dengan lima indikator ,yaitu rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, lingkungan permukiman kumuh dan rumah layak huni. Perkembangan capaian indikator pada urusan wajib perumahan selama kurun waktu 2019-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Realisasi Indikator Kinerja Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Layanan Urusan Wajib Perumahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019		Tahun 2020			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2019 terhadap Target Akhir 2021
			2019	2019	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (9)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai AKIP	55	54.58	56	59.81	100	61	86.9-
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Sarana Prasaranya	Persentase RTLH	12,36	17.1717	13.67	21.67	83.26	15	114.47
		Persentase Rumah Layak Huni	96	96	97	97	100	96	89.9
3	Meningkatnya Kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luasan RTH Publik	8	8	12	8	100	14	57.1
		Persentase Kawasan Kumuh	1	1	0.5	1.37	100	0.1	7.2

a. Lingkungan Permukiman Kumuh

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, maka kebutuhan penyediaan akan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik melalui peningkatan maupun baru. Selanjutnya pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, sehingga kapasitas daya dukung prasarana dan sarana lingkungan permukiman

Yang adamulai menurun yang pada gilirannya memberikan konstribusi terjadiny a lingkungan permukiman kumuh. Perkembangan capaian lingkungan pemukiman kumuh selama periode 2019-2020.

b. Rumah Layak Huni

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik .maka harus dipenuhi isyarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga.Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni,diharapkan tercapai ketahanan keluarga.Capaian rumah layak huni diKabupaten Pematang terus menunjukkan tren yang positif. Di Tahun 2020 capaiannya sebesar 97 %, meningkat1% dibanding tahun sebelumnya.

c. Persentase RTLH

RTLH merupakan program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dimana pemerintah memberikan rangsangan bantuan bagi masyarakat tidak mampu atau Masyarakat 21.67.% capaian indikator ini menunjukkan kecenderungan positif, dimana bisa menambah rumah kategori layak huni bagi masyarakat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.2.1. Urusan Perumahan Perumahan

Kinerja penyelenggaraan urusan wajib perumahan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5(lima) target indikator dalam Renja Tahun 2021 dan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, seperti tertuang dalam tabel hasil pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang di atas, secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis 1** :Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2020			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 2018 terhadap Target Akhir 2021
			2019	2019	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai SAKIP	55	54.58	56	59.81	-	61	127

Dokumen Renja merupakan laporan tahunan yang berisi rencana kerja suatu instansi dalam merencanakan tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar rencana sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan/perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah demi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Renja .

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu instansi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya memiliki peranan/kontribusi dalam pencapaian target kerja yang telah ditentukan.

2. **Sasaran Strategis 2:** Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun		Tahun 2020			Target Akhir Renstra	% Capaian s/d 20120 terhadap Target Akhir 2021
			2019	2019	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10) = (7) / (9)
2	Meningkatnya Kawasan Perumahan dan Sarana prasarananya	Persentase RTLH	12.36	17.17	13.67	21.67	83.2	15	114.47
		Persentase Rumah Layak Huni	96	96	97	97	100	96	89.9
3	Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman	Persentase Luasan RTH Publik	8	8	12	8	57.1	14	57.1
		Persentase Kawasan Kumuh	1	1	0.5	1.37	100	0.1	7.2

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan perumahan diatas, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD, terlihat bahwa dari sebanyak 5(lima)target indikator RPJMD Tahun 2016-2021,4(empat) indikator berstatus akan tercapai, dan 1 (satu) indikator berstatus sulit tercapai, yaitu Kawasan Kumuhhal ini karena efek dari pandemi covid 19.

Dibandingkan target capaian indikator Renja Tahun

2021, maka sebanyak 2(dua) indikator belum memenuhi target capaian,antara lain:

a. Kawasan kumuh

b. Luasan RTH Publik

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2021 berikut kami sajikan hasil Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Pemerintah daerah dan Pencapaian Renja PD s/d tahun 2020 Triwulan I sampai triwulan IV Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya seperti dalam Lampiran tabel 2.2.2. berikut:

Formulir Evaluasi Hasil Renja PD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
Periode Pelaksanaan Triwulan IV Tahun 2020

No	Ko de Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2016 s/d 2021 Periode Renstra PD		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun 2016		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2020	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)	Realisasi			SKPD Pengampu								
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		I	II	III		IV	Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (AKM)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Tahun 2020 (%)										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11	13=12/7x100	14=6+12		14=13/7*100		15=14/5x100					
				K	RENSTRA	K	Rp (juta)	K	RENJA	APBD	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp juta	K	Rp	K	Rp	Rp	K%	Rp	K%	Rp		
1	1.04.1.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan	100%	47234000	100	885,94	12	13293000	16.199.200	3	2.541.273	3	6580213,15															PERKIM
	1.04.1.04.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim 1000 (12 bulan)	100%	110.000	100	38,85	12	15000	8.100	3	900	3	1.490	3	0		4790	12	7180	100	88,64							

1.04.1.04.01	01.02	Penyediaan jasa komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi , sumberdaya air, listrik serta LPU 6 jenis kebutuhan (12 bulan)	100 %	38.200.000	100	93,51	12	12600	15.251.100,0	3	2.493.351,90	3	6.215.300	3	1.255.282,00	5019823,01	12	14983757	100	98,25							
							3																					
1.04.1.04.01	01.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 34 KALI unit (12 bulan)	100 %	750000	100	31,31	12	20000	30000	3	728,35	3	7259,6	3	1021,1	8829,7	12	17838,7	100	59,46							
1.04.1.04.01	01.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyedia Jasa Administrasi Keuangan 10 Orang laporan (12 bulan)	100 %	375000	100	80,84	12	100000	150000	3	10000	3	60110,0	3	13250	62500	12	145860	100	97,24							
1.04.1.04.01	01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya 1 paket (12 bulan)	100 %	340000	100	32,92	12	60000	90000	3	6627,9	3	37113,5	3	9649,6	33575,5	12	86966,5	100	96,63							
1.04.1.04.01	01.10	Penyediaan alat tulis Kantor	Persediaan alat tulis kantor yang tersedia 1 paket (12 bulan)	100 %	229000	100	75,19	12	50000	60000	3	3893	3	27864,0	3	6618	21602,2	12	59977,2	100	99,96							
1.04.1.04.01	01.11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang di gandakan 200000 lembar dan jumlah dokumen yang di cetak 1 paket (12 bulan)	100 %	430000	100	76,61	12	50000	60000	3	6669,6	3	25515,6	3	4825,8	22935,8	12	59946,8	100	99,91							

Kantor	1.04.1.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan gedung kantor (12 bulan)	100 %	900000	100	59,70	12	25000	20000	3	0	3	7730	3	2164	1012	19980,5	100	99,90							
	1.04.1.04.01.01.14	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan perlengkapan kantor yang tersedia 8 unit (12 bulan)	100 %	130000	100	93,89	12	60000	50000	3	0	3	48675,0	3	0	300	48975	100	97,95							
	1.04.1.04.01.01.15	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga (12 bulan)	100 %	400000	100	46,39	12	18000	35000	3	2499	3	10356,0	3	2705	14859,3	30419,3	100	86,91							
	1.04.1.04.01.01.17	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia 1 paket (12 bulan)	100 %	5000000	100	88,26	12	15000	20000	3	1390	3	6950,0	3	0	9173	17513	100	87,57							
	1.04.1.04.01.01.18	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman 4575, 750 ,300 dus (12 bulan)	100 %	300000	100	74,11	12	50000	70000	3	5305	3	26866,5	3	4714,5	32378,8	69264,8	100	98,95							
	1.04.1.04.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 181, 150, 137 oh (12 bulan)	100 %	450000	100	94,36	12	150000	325000	3	7908,6	3	94682,9	3	40039,5	169534,2	312165,2	100	96,05							
	1.04.1.04.01.01.19	Penyediaan jasa keamanan	Jumlah Penyediaan jasa keamanan 3 orang	100 %	430000	100	0,00	12	80000	30000	3	2.000	3	10300,0	3	2000	10347	24647	100	82,16							

2	1.04.1.04.01.02	Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur	Persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan	100 %	430000	100	625,86	12	3010000	620000	27	9.015							30	9015	250	1.45						PERKIM	
	1.04.01.01.02.42	Rehabilitasi berat /sedang gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi berat /sedang gedung kantor							100000			3	98400,0	3	0	3	300	98700	#DIV/0!	98,70								
	1.04.1.04.01.02.05	pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 12 unit 12 bulan	100 %	430000	100	0,00	12	600000	50000	3		3	0,0	3		3	49800	12	49800	100	99,60							
	1.04.1.04.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 11 buah	100 %	430000	100	97,17	12	50000	65000	3		3	41157,0	3	0	3	23669,6	12	64829,6	100	99,74							
	1.04.1.04.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Pengadaan Peralatan Gedung kantor 2 paket 12 bulan	100 %	430000	100	0,00	12	50000	25000				9	20155		3	4815	12	24970	100	99,88							
	1.04.1.04.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur 40 buah , 2 paket 12 bulan	100 %	430000	100	99,90	12	50000	18900				9	17540		3	700	12	18240	100	96,51							
	1.04.1.04.01.02.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Pengadaan komputer dan perlengkapannya 6 unit	100 %	430000	100	94,56	12	50000	125000	3	400	3	-225,0	3	750	3	117394,2	12	118319,2	100	94,66							

1.04.1.04.01	02.13	Pengadaan peralatan kerja	Pengadaan peralatan kerja 4 unit 12 bulan	100 %	430000	100	99,90	12	50000	50000	3	3	17812,0	3	275	31312	12	49399	100	98,80						
1.04.1.04.01	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah service kendaraan roda 75 kali unit, service kendaraan roda 2, 100 unit, roda 4 30 kali. Suku cadang 1 paket pelumas yang tersedia 2800 liter dan pertamax yang tersedia 500 liter (12 bulan)	100 %	550000	100	79,63	12	100000	150000	3	14817,000	3	32052,5	3	28326,5	70512,9	12	145708,9	100	97,14					
1.04.1.04.01	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 paket (12 bulan)	100 %	175000	100	11,13	12	20000	150400	3	1610	3	11635,0	3	6450	130705	12	150400	100	100,00					
1.04.1.04.01	02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubel yang dipelihara 12 bulan	100 %	165000	100	99,35	12	10000	10000	3	0	3	200,0	3	0	9800	12	10000	100	100,00					
1.04.1.04.01	02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan peralatannya yang terpelihara (12 bulan)	100 %	150000	100	44,22	12	30000	25000	3	1030	3	6220,0	3	2925	14825	12	25000	100	100,00					
1.04.1.04.01	02.42	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 1 paket	100 %				12		100000	3	0	3	56075,0	3	42325	300	12	98700	100	98,70					
3	1.04.1.04.01.05	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase terwujudnya peningkatan sumber daya aparatur	100 %	175	100	96,17	12	70000	100000		10735						0	10735	0	10,74					PERKIM

	1.04.1.04.01.05.04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan 1 paket (12 bulan)	100 %	175000	100	96,17	12	70000	100000	3	0	3	3	75900	3	21150	12	97050	100	97,05							
4	1.04.1.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Prosentase tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahun	100	705000	100	384	12	220000	210000	3	10735						3	10735	25	5,11						PERKIM	
	1.04.1.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang di susun 2 Laporan (12 bulan)	100 %	50000	100	84,46	12	30000	40000	3	4102,5	3	18026,5	3	1495	3	13588,6	12	37212,6	100	93,03						
	1.04.1.04.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 2 laporan (12 bulan)	100 %	50000	100	89,97	12	30000	35000	3	0	3		3	7500	3	16764	12	24264	100	69,33						
	1.04.1.04.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran semester 1 dan 2 laporan, laporan inventarisasi barang milik daerah 2 laporan (12 bulan)	100 %	50000	100	96,73	12	25000	30000	3	2485	3	7160	3	7295	3	10792	12	27732	100	92,44						
	1.04.1.04.01.06.04	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah laporan akhir tahun yang disusun 2 laporan (12 bulan)	100 %	75000	100	44,16	12	35000	45000	3	4147,5	3	22074,5	3	0	3	15489,5	12	41711,5	100	92,69						

1.04.1.04.01.06.09		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Laporan bulanan perkembangan kegiatan DPU K Pemalang 1 tahun, Laporan monitoring kegiatan 6 kali (12 bulan)	100 %	480000	100	69,04	12	100000	112500	3	0	3	38040	3	7250	3	57879,9	12	103169,9	100	91,71							
5	1.04.1.04.01.09	Program peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran skpd	100 %	250000	100	187,46	12	225000	175000	3	0							3	0	25	0,00						PERKIM	
1.04.1.04.01.09.01		Penyusunan dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA) (12 bulan)	100 %	250000	100	99,76	12	100000	100000	3	0	3	30030,9	3	11255,1	3	50750,9	12	92036,9	100	92,04							
1.04.1.04.01.09.02		Penyusunan Data Base perencanaan SKPD	Jumlah jasa konsultasi Harga satuan pekerjaan sm I dan SmII	100 %		100	87,70	12	125000	100000	3	0	3		3	0	3	97680	12	97680	100	97,68							
9777,5	1.04.1.03.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tinggal bersantasi	100 %	334	100	617,82		330000		33					PERKIM													

1.04.1.04.01.01.15.01	Penetapan kebijakan , strategi , dan program perumahan	TerlaksananyaPerb up Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman 1 perbup			100	54,61	12	100000	100000			11477,5	11821,5	75538	12	98837	100	98,84						
			3	0	3			3	3															
1.04.1.04.01.01.15.03	Koordinasi penyelenggaran pengembangan perumahan	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 50 persen (12 bln)			100	46,66	12	50000	100000			25256,2	14174,8	37980,9	12	77411,9	100	77,41						
			3	0	3			3	3															
1.04.1.04.01.01.15.04	Sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perumahan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang perumahan 90 persen 12 bulan	100 %		100	49,14	12	50000	50000	3	0	15775,4	4199,6	11778,4	12	31753,4	100	63,51						
				3		3			3															
1.04.1.04.01.01.15.05	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Terlaksananya Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 11 kegiatan 90 persen (12 bln)			100 %	63,52	12	50000	25000	3	1367,5	7929,1	2199,4	7	12	18911,6	100	75,65						
				3		3			3															
1.04.1.04.01.01.15.06	Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Terlaksananya Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 240 rumah				92,16	12	2700000	2460000	3	0	235288	62950	2013	9	2312198,5	75	93,99						
				3		3																		

1.04.1.04.01.01.15.07	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 11 paket (12 bln)	100 %	3	5400	3	95,84	12	1800000	3200000			455942,4	1070005,6	1650137,3	12	3181485,3	100	99,42						
1.04.1.04.01.01.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 kegiatan (12 Bln)	100 %	3	540	3	44,58	12	50000	50000			15788,4	-0,4	30429,7	12	46757,7	100	93,52						
1.04.1.04.01.01.15.09	Pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)	Terlaksananya Pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum 10 paket 90 persen (12 bln)	100 %	3	64690	3	80,35	12	30000	16650000			502890,7	881048,3	12935490,1	12	14384119	100	86,89						
1.04.1.04.01.01.15.10	Pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas umum	Terlaksananya Pemeliharaan prasarana dan sarana utilitas umum 11 paket (12 Bln)	100 %	3	25480	3	90,96	12	1600000	2700000			503242,9	182844,1	1906760,7	12	2618327,7	100	96,98						
1.04.1.04.01.15.11	Penyusunan database perumahan	Terlaksananya Penyusunan database perumahan 211 desa /kelurahan	100 %	3	0	3	0,00	12	100000	50000			26941	2100	17911,84	9	46952,84	75	93,91						
1.04.1.04.01.15.13	Fasilitasi dan verifikasi proses Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Terlaksananya Fasilitasi dan verifikasi proses Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) 100 orang 12 bulan	100 %	3	0	3		12	500000	50000			25898,6	1440	8653,5	9	35992,1	75	71,98						

1.04.1.04.01	15.14	Fasilitasi dan verifikasi pengajuan Rekomendasi i Teknis IMB	TerlaksananyaFasilitasi dan verifikasi pengajuan Rekomendasi Teknis IMB 100 orang 2 kali 12 bulan	100 %		100		12	50000	50000			34637	0	12061	46698	93,40						
					0	3		3		3													
1.04.1.04.01	15.17	Perencanaan pembangunan/pemeliharaan Prasarana dan Sarana umum	TerlaksananyaPerencanaan pembangunan/pemeliharaan Prasarana dan Sarana umum rumah tinggal bersanitasi 73% dan 3% kawasan kumuh	100 %		100		12	500000	100000			2864,8	11189,2	64188,7	78242,7	78,24						
					0	3		3		3													
7	1.04.1.04.01.16	Program lingkungan sehat perumahan ketersediaan rumah layak huni	Cakupan	100 %	11600000	100	157,77		1250000	49000	22206	1775											
	1.04.1.04.01.01.15.01	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan 1 keg	100 %		100	70,77	12	200000	25000	3		-1288,8	220,8	14402,2	12	15109,2	100	60,44				
	1.04.1.04.01.01.15.03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	TerlaksananyaPenyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungansehat perumahan 1 keg	100 %	1775	3	62,78	12	50000	25000	3		3895	350	19812	12	24057	100	96,23				
					0	3		3		3													

1.04.1.04.01.01.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 kegiatan 12 bulan	100 %	3	0	3	24,22	12	50000	25000			711,1	74,9	20660	12	21446	100	85,78	
1.04.1.04.01.16.07	Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam 5 kegiatan 12 bulan	100 %			100		12	400000	100000	3	0	3	12146,9	7059,1	67790,5	12	86996,5	100	87,00
1.04.1.04.01.16.08	Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berkemampuan rendah (MBR)	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berkemampuan rendah (MBR)	100 %			100		12	50000	50000			2480	5850	16449,4	12	24779,4	100	49,56	
1.04.1.04.01.16.09	Pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan dan pengendalian kawasan permukiman	Terlaksananya Pembinaan dan bimbingan teknis penyediaan dan pengendalian kawasan permukiman	100 %			100			100000	100000				1946		12	99299	100	99,30	
1.04.1.04.01.16.11	Fasilitasi penyediaan dan pengembangan kawasan siap bangun (KASIBA)	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan dan pengembangan kawasan siap bangun (KASIBA)	100 %			100			50000	10000				0			0			

1.04.1.04.01	16.12	Pencegahan dan penanggulangan rumah kumuh dan permukiman kumuh	Terlaksananya Pencegahan dan penanggulangan rumah kumuh dan permukiman kumuh	100%	3	0	3	3	12	200000	40000	3	1720	450	36123	12	38293	100	95,73
8	2.04.1.04.01.15	Program penyelesaian konflik pertanahan	persentase terlaksananya penyelesaian konflik pertanahan	100%	2100000	100	149,33	500000	700000	12	22206,4								
1.04.1.04.01.01	15.01	Fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan	Terlaksananya Fasilitas penyelesaian permasalahan di bidang pertanahan 1 kepmen 1 ba (12 Bln)	100%	12049,2	3	58,14	12	250000	500000	3	29099,8	224	12	296825,1	100	59,37		
2.04.1.04.01	15.02	Rapat koordinasi di bidang pertanahan	Terlaksananya Rapat koordinasi di bidang pertanahan 1 kegiatan 12 bulan	100%	500.000	100	91,19	12	100000	500000	3	86953	49,8	3331028	3	430262,8	25	86,05	
2.04.1.04.01	15.03	Fasilitasi pengadaan tanah	Terlaksananya Fasilitas pengadaan tanah 1 kegiatan 12 bulan	100%	10157,2	3	91,19	12	50000	500000	3	49180,4	9967,6	53534,6	12	106682,6	100	2,11	
2.04.1.04.01	15.04	Penyusunan database pertanahan	Terlaksananya Penyusunan database pertanahan 1 paket 12 bulan	100%	0	3	91,19	12	100000	75000	3	14512	0	48006,56	12	62518,56	100	83,36	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:				3	0	3	3	3											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																			

Tidak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

No	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	SATUAN	Target Kinerja dan Anggaran(Tahun 2021)		Realisasi Kinerja dan anggaran Renja OPD pada triwulan(Tahun 2021)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2021 (%)		SKPD Pengampu		
							I	II	III	IV	12=8+9+10+11	13=12/7x100								
1	2	3	4		7		8	9		10		11								
					K	RENJA	APBD	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp juta	K	Rp juta	K%	Rp	
A	1.04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TERWUJUDNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																	
I	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TERWUJUDNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	%	100				Rp5,298,558		Rp5,527,171		Rp7,859,157							
I	1.04 . 1.04.01 . 01,01	Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Program Penunjang Urusan emerintah Daerah		12	0	55,500	31,947		311,775		314,339		0		928060.8		75	#REF!	PERKIM

1	1.04 . 1.04.01 . 01.01.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran pengendalian laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi OPD	dokumen	6	5,000,	9,000	1	753	1	2,036	1	3,237	3	6,026	50	#REF!
2	1.04 . 1.04.01 . 01.01.02	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah dokumen RKA tersusun	dokumen	6	5,000,	3,000.0	0	0.00	3	682	3	1,983.00	6	2,665	100	#REF!
3	1.04 . 1.04.01 . 01.01.03	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah perubahan RKA tersusun	BULAN	12	5,000,	4000	3	0	3	765.0	3	1528.2	9	2293.2	75	#REF!
4	1.04 . 1.04.01 . 01.01.04	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	Jumlah dokumen DPA tersusun	BULAN	12	5,000,	4000	3	624	3	1791.8	3	176	9	2591.8	75	#REF!
5	1.04 . 1.04.01 . 01.01.05	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.	Jumlah perubahan DPA tersusun	BULAN	12	5,000,	7500	3	250	3	250.0	3	775	9	1275	75	#REF!
6	1.04 . 1.04.01 . 01.01.06	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja tersusun	BULAN	12	75,000,	20000	3	320	3	5650.2	3	5,850	9	11820	75	#REF!

7	1.04 . 1.04.01 . 01.01.07	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah evaluasi kinerja Perangkat tersusun	BULAN	12	55,000,	8,000	3	0	3	600.0	3	790	9	1390	75	#REF!		
2	4 . 1.04.01 . 01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BULAN	12	3010000	6,520,873	3	1,464,636	3	1,465,522	3	1,523,207	9	4453365.1	75	#REF!	PERKIM	
8	. 1.04.01 . 01	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayar	BULAN	12	6,296,240,	5277473	3	1455031	3	1455031	3	1512398.3	9	4422460.3	75	#REF!		
9	. 1.04.01 . 01	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah laporan akhir akhir Penyusunan tersusun	dokumen	2	5,000,	3000	0	0	1	176.8	1	1071.6	2	1248.4	100	#REF!		
10	. 1.04.01 . 01	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.Tersusun	BUAH	4	3,000,000	3000	1	0	1	209.4	1	1039	3	1248.4	75	#REF!		
11	. 1.04.01 . 01	4. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	BULAN	12	2,000,	2000	3	0	3	0	3	273	9	273	75	#REF!		
3	04,1,04,01,01,	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	BULAN	12	3010000	11000	3	9,015	3	9,015	3	9,015	9,015	9	36060	75	#REF!	PERKIM

1	4,1,04,01,01,03	1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD.	Tersusunnya Penilaian Barang Milik daerah SKPD.	BULAN	12	50,000,000	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	
12	4,1,04,01,01,03	2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah SKPD.	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah SKPD.	bulan	12	5,000,000	1224400	3	590	3	1090.0	3	-590	9	1090	75	#REF!	
4	04,1,04,01,01,05	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	bulan	12	3010000	160000	3	9,015	3	9,015	3	9,015	9	36060	75	#REF!	PERKIM
13	4,1,04,01,01,05	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.\tersedia	paket	1	25000	25000	0	-	1	11250.0	0	0	1	11250	100	#REF!	
14	4,1,04,01,01,05	2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.	BULAN	12	50000	0	3	-	3	0.0	0	0	6	0	50	#REF!	
15	4,1,04,01,01,05	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai yang terlatih Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	BULAN	12	20000	2660	3	-	3	2350.0	3	0	9	2350	75	#REF!	
16	4,1,04,01,01,05	4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	BULAN	12	20000	2150	3	-	3	2110.0	3	0	9	2110	75	#REF!	

17	4,1,04,01,01,05	5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	BULAN	12	100000	0	3	-	3	0.0						50	#REF!		
5	4,1,04,01,01,04	Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	BULAN	12	70000	472500	3	91,866	3	245,622					#REF!	272138.598	#REF!	#REF!	PERKIM
18	4,1,04,01,01,0	1. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	BULAN	12	20000	11500	3		3	11162					9	11,162	75	#REF!	
19	4,1,04,01,01,0	2. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Jumlah aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Tersedia	dokumen	4	5000	5000		0	4	4246					4	4,246	100	#REF!	
20	4,1,04,01,01,0	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	BULAN	12	30000	15000	3	2043	3	10207					9	12,436	75	#REF!	
21	4,1,04,01,01,1	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor. tersedia	BULAN	12	50000	40000	3	37268	3	37268					9	74,536	75	#REF!	
22	4,1,04,01,01,0	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Peralatan Rumah Tangga. Tersedia	BULAN	12	40000	64000	3	21,687	3	41,442					9	55,665	75	#REF!	

23	4,1,04,01,01,0	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan.	BULAN	12	50000	60000	3	13135	3	38158.1	3	6175.9	9	57,469	75	#REF!	
24	4,1,04,01,01,0	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.t tersedia	BULAN	12	25000	16800	3	2780	3	8340	3	2780	9	13,900	75	#REF!	PERKIM
25	4,1,04,01,01,0	6. Penyediaan Bahan/Material.	Jumlah Bahan/Material tersedia	DOKUMEN	5	55000	45000	1	5527	3	18697	1	11181.5	5	35,406	100	#REF!	
26	4,1,04,01,01,0	7. Fasilitas Kunjungan Tamu.	Jumlah Kunjungan Tamu.	DOKUMEN	1	50000	5000	0	0	1	281	0	0	1	281	100	#REF!	
27	4,1,04,01,01,0	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	PERBUP	1	50000	95200	0	9426	0	61212.1	1	12854.598	1	83,493	100	#REF!	
28	4,1,04,01,01,0	1. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	BULAN	12	20000	11500	3	0	3	10362	3	800	9	11,162	75	#REF!	
29	4,1,04,01,01,0	2. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Jumlah aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Tersedia	dokumen	4	5000	5000	0	0	4	4246	0	0	4	4,246	100	#REF!	
6	1,04,1,04,01,01,07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Unit	11	1250000	1690000	0	11558	8	189210.3	3	1115738	11	1,316,506	100	#REF!	

30	1,04,1,04,01,01,07,02	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan tersedia	unit	2	14500000	1470000	0	11558	1	43671.5	1	1064780	2	1,120,010	100	#REF!	
31	1,04,1,04,01,01,07,05	2. Pengadaan Mebel.	Jumlah Mebeleur tersedia	unit	4	50000	50000	0	0	4	49489.8	0	0	4	49,490	100	#REF!	
32	1,04,1,04,01,01,07,06	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya.ter sedia	unit	2	50000	50000	0	0	2	48114	0	0	2	48,114	100	#REF!	
33	1,04,1,04,01,01,07,07	4. Pengadaan Aset tetap Lainnya.	Jumlah Aset tetap Lainnya tersedia	unit	2	50000	50000	0	0	1	47,935	1	1600	2	49,535	100	#REF!	
34	1,04,1,04,01,01,07,11	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedia	unit	1	50000	50000	0	0	0	0	1	49358	1	49,358	100	#REF!	
7	1,04,1,04,01,01,08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Daerah	Terlaksananya Jasa penunjang Urusan Daerah	bulan	12	1250000	18121	3	3776873	3	3800310.06	3	5148386.983	0	9	12,725,570	75	#REF!
35	1,04,1,04,01,01,08,01	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Jasa Surat Menyurat.	BULAN	12	5000	5000	3	1850	3	1303.5	3	1837	9	4,991	75	#REF!	
36	1,04,1,04,01,01,08,02	2. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik.	BULAN	12	17850000	15336715.6	3	3745703	3	3775851.06	3	4966871.983	9	12,488,426	75	#REF!	
37	1,04,1,04,01,01,08,03	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	BULAN	12	50000	50000	3	12320	3	23155.5	3	7678	9	43,154	75	#REF!	

38	1,04,1,04,01,01,08,4	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor.	BULAN	12	227800	232000	3	17000	3	0	3	172000	9	189,000	75	#REF!
8	04, 1,04,01,01,	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BULAN	12	500000	375000	3	25514	3	42323.3	3	39455.739	9	18,188,003	75	#REF!
39	4, 1,04,01,01,0	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	BULAN	12	30000	10000	3	656	3	6222.5	3	3097.7	9	9,976	75	#REF!
40	4, 1,04,01,01,0	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	BULAN	12	30000	30000	3	551	3	1577	3	19158	9	21,286	75	#REF!
41	4, 1,04,01,01,0	3. Pemeliharaan Mebel.	Jumlah Pemeliharaan Mebel.	BULAN	12	15000	15000	3	10500	3	4450	3	0	9	14,950	75	#REF!
42	4, 1,04,01,01,0	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	BULAN	12	70000	70000	3	13807	3	30073.8	3	17200.039	9	61,081	75	#REF!

43	4,1,04,01,01,0	5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.	BULAN	12	20000	20000	3	0	3	10325.5	3	17887214.5	9	17,897,540	75	#REF!
44	4,1,04,01,01,0	6. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	BULAN	12	100000	84000	3	0	3	3000	3	80931.6	9	83,932	75	#REF!
45	4,1,04,01,01,0	7. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	BULAN	12	50000	50000	3	0	3	10845	3	29710.5	9	40,556	75	#REF!
46	4,1,04,01,01,0	8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya.	BULAN	12	50000	50000	3	0	3	0	3	48858	9	48,858	75	#REF!
47	4,1,04,01,01,0	9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.	paket	1	10000	10000		1782	1	8042.5	0	0	1	9,825	100	#REF!
II	1,04,02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA/RELOKASI PROGRAM KAB/KOTA	%	100												

9	04, 1,04,01,01,	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau relokasi program Kab/kota	Terlaksananya Pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau relokasi program Kab/kota	dokumem	1	500000	50000	0	550	0	14837.6	1	9493.667	0	1	24881.267	100	#REF!
48	4, 1,04,01,01, 1	1. Identifikasi perumahan/ Lokasi Rawan bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota.	Jumlah dokumen Lokasi Rawan bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota.	dokumem	1	50000	50000	0	1418	0	4735	1	4668		1	10821	100	#REF!
10	04, 1,04,01,01,	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/kota	dokumem	4	500000	25000	1	550		10102.6	1	4825.667	0	3	15478.267	75	#REF!
49	4, 1,04,01,01, 1	1. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.	dokumem	4		5000	1	800	1	946	1	0		3	1746	75	#REF!

11	04, 1,04,01,01,	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/kota	Rumah,dokumen	12	500000	150000	0	550	1	9156.6	3	4825.667				14532.267	0	#REF!
50	4, 1,04,01,01,1	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana terrehabilitasi	Rumah	10	100000	85926	0	550	0	8169.6	2	3145.667				11865.267	20	#REF!
51	4, 1,04,01,01,1	2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.	dokumen	2	25000	37738	0	0	1	987	1	1680				2667	100	#REF!
12	04, 1,04,01,01,	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	10	500000	25000	0	0	5	960	5	3851.99				4811.99	100	#REF!

52	4,1,04,01,01,1	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen	10	25000	21336	0	0	5	960	5	3851.99	10	4811.99	100	#REF!
13	04,1,04,01,01,1	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	kali, dokumen	4	500000	403000	0	0	1	86184.2	1	83141.05	2	169325.25	50	#REF!
53	4,1,04,01,01,1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	kali	2	50000	253000	0	45506	1	86184.2	1	83141.05	2	214831.25	100	#REF!
54	4,1,04,01,01,1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terpelihara	dokumen	2	300000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!
14	04,1,04,01,01,1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	rumah	2	500000	20000	0	2225	1	5709	1	3560	2	11494	100	#REF!
55	4,1,04,01,01,2	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	rumah	2	50000	20000	0	2225	1	5709	1	3560	2	11494	100	#REF!

III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE KAWASAN KUMUH	Luas kawasan kumu dikurangi luas kumuh tertangani /luas kawasan kumuh x 100		53.5														
15	04, 1,04,01,01,	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	rumah	224	500000	37602026	30	32503.5	80	97602.2	20,461,013	110	20591118.91	49.11	#REF!			
56	4, 1,04,01,01, 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak huni	rumah	112	1000000	5,709,440	30	3335	40	99669	5,430,497	110	5533501.25	98.21	#REF!			
57	4, 1,04,01,01, 2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	rumah	112	2500000	30328000	0	29168.5	40	63970.5	15030515.96	80	15123654.96	71.43	#REF!			
IV	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DITANGANI	JUMLAH PERBAIKAN RUMAH LAYAK HUNI DI KAWASAN KUMUH	%	25														

16	04, 1,04,01,01,	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	rumah	15	500000	467000	0	0	10	181151.5	5	150693.407		15	331844.907	100	#REF!
58	4, 1,04,01,01, 2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	rumah	15	480000	467000	0	0	10	181151.5	3	150693.407		13	331,845	86.66666667	#REF!
V	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM (psu)	PERSENTAS E PSU DALAM KONDISI BAIK	JUMLAH LINGKUNGAN YANG DIDUKUNG DENGAN PSU/ JUMLAH PSU DALAM KONDISI BAIK	%	45													
17	04, 1,04,01,01,	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya PSU Perumahan	Paket	2	500000	8827000	0	0	-	30071	2	2503286.756		2	2533357.756	100	#REF!

59	4, 1,04,01,01, 2	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	paket	1	200000	100000	0	0	4105.5	1	43695.024	1	47.801	100	#REF!
60	4, 1,04,01,01, 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian tersedia	paket	1	6830000	5982000	0	0	25590.5	1	2447707.732	1	2473298.232	100	#REF!
61	4, 1,04,01,01, 2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	paket	1	30000	30000	0	0	375	1	11884	1	12259	100	#REF!
B	1.1	URUSANPEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN PERTANAHAN	TERWUJUDNYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN													

VI	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSentase Sengketa Tanah Garapan yang diselesaikan	Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang diselesaikan / Jumlah Sengketa Tanah Garapan X 100			30													
18	04, 1,04,01,01,	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya penyelesaian sengketa tanah garapan			2	500000	120000	0	0	57833.8	19772.863	0	77606.663	0	#REF!			
62	4, 1,04,01,01, 1	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	DOKUMEN		2	120000	107000	0	1	57833.8	19772.863	2	77606.663	100	#REF!			
VII	19	PERSentase Sertifikasi Hak Atas Tanah	Jumlah Sertifikasi yang diselesaikan / Jumlah Sertifikasi sesuai target X 100			60													

	63																		
	PROGRAM PENATAGU NAAN TANAH																		

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, antara lain:

1. Kurangnya penyediaan database perumahan, permukiman dan pertanahan yang valid dan mutakhir
2. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni
3. Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh
4. Kurangnya ketersediaan PSU
5. Rendahnya kualitas kualitas rumah susun
6. Belum optimalnya sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi pertanahan
7. Belum optimalnya sertifikasi kepemilikan hak atas tanah

Selanjutnya untuk lebih jelas melihat Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya berdasarkan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimum kami sajikan dalam tabel pada Renstra Pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya seperti dalam tabel 2.2.3 sebagai berikut :

TABEL 2.2.3 PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Indikator	IKK (PP No.6/ 2008)	Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisi s
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Nilai Sakip	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelengaraan pemerintah	40	45	50	52	55	61	55	59.51	61	62	
2	Persentase Rumah Layak huni	Persentase Rumah Layak huni	93	94	95	96	97	98	97	97	98	98	
3	Persentase luasan RTH Publik	Persentase luasan RTH Publik	2	4	6	8	12	14	12	8	14	10	

TABEL 2.2.3 PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Indikator	IKK (PP No.6/ 2008)	Target Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Anallisi s
			Tahun	Tahun	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	Tahu n	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2020	2021	2021	
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Persentase RTLH	Persentase RTLH tertangani	4.17	9,74	11.05	12.36	13.67	15	13.67	21.67	22	22	
5	Persentase kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh	4,7	3	2	1	0.5	0.1	0.5	1.37	0.1	1	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil analisis data dan permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing urusan pembangunan daerah, dapat dirumuskan isu strategis Pembangunan daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022 yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah sebagai berikut:

Dari identifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Pemalang, serta dengan memperhatikan lingkungan strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagai berikut:

Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur pada dasarnya merupakan asset pemerintah yang dibangun dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Saat ini masalah infrastruktur terutama kawasan kumuh menjadi agenda penting untuk dibenahi, karena merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan, diantaranya untuk mencapai target kumuh 0% secara kualitatif maupun kuantitatif. Penanganan kawasan kumuh memberikan peran sebanyak-banyaknya dalam pengentasan kemiskinan, yang dipastikan dapat menunjang perekonomian.

Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi. Dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi terkait. Pembangunan infrastruktur antara lain dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, menghemat penggunaan energi, memperlancar arus barang, membuka berbagai kemungkinan investasi, yang

Pada akhirnya akan meningkatkan produksi barang dan jasa diberbagai sektor yang pada ujungnya memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan

kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta dapat mengurangi biaya investor dalam dan luar negeri.

Adapun analisis lingkungan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

2.3.1.Urusan Perumahan

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Disperkim Kabupaten Pemalang; telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pemalang; telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang, telaah Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; dan telaah RTRW Kabupaten Pemalang dan KLHS maka berikut ini adalah isu-isu strategis yang dapat ditindaklanjuti Disperkim Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Masih kurangnya ketersediaan database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang valid dan mutakhir
2. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Pemalang
3. Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani
4. Belum optimalnya penanganan korban bencana dan penduduk yang terkena relokasi program pemerintah yang seharusnya mendapatkan rumah layak huni
5. Kurang optimalnya Penyediaan PSU permukiman
6. Masih kurangnya kualitas rumah susun yang ada
7. Masih adanya sengketa pertanahan yang belum terfasilitasi karena cakupannya yang luas

a. Lingkungan Internal

Kekuatan

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang mempunyai sumber daya manusia sebanyak 56 pegawai. Secara kuantitas dan kualitas jumlah pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang cukup potensial baik dari kepangkatan/golongan, pendidikan maupun dari bidang keahlian.

Tabel 2.3.1 menggambarkan pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang berdasarkan eselon.

Tabel 2.3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Sumberdaya Manusia Disperkim Kabupaten Pemalang

NO	KETERANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan			
1	Pasca Sarjana	4	1	5
2	Sarjana	9	3	12
3	Diploma	2	-	2
4	SMA	18	4	22
5	SMP	4	-	4
6	SD	2	-	2
	Jumlah	39	8	47
B.	ASN Berdasarkan Golongan			
1	ASN Gol. IV	4	1	5
2	ASN GOL. III	14	6	20
3	ASN GOL. II	17	2	19
4	ASN GOL. I	4	-	4
	Jumlah	39	9	48
C	NON ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan			
1	Pasca Sarjana			
2	Sarjana	16	8	24
3	Diploma	3	5	8
4	SMA	50	18	68
5	SMP	2	-	2
6	SD	3	-	3
	Jumlah	74	31	105

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pemalang 2021

Sarana dan Prasarana (Peralatan dan Inventaris Kantor); Fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dijelaskan pada table 2.3.2

Tabel 2.3.2 Fasilitas dan Peralatan

No	Nama / Jenis Barang	Satuan	Jumlah	Harga
1	Mesin Gergaji	Buah	1	1.920.000,00
2	Exhaust Fan	Unit	2	7.000.000,00
3	Televisi	Unit	1	3.000.000,00
4	PC Unit	Unit	1	6.000.000,00
5	Laptop	Unit	1	5.918.000,00
6	Handphone	Unit	1	6.000.000,00
7	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	M2	1	213.472.000,00
8	Instalasi	M2	1	748.811.000,00
9	Sepeda Motor	Unit	1	15.620.000,00
10	Sepeda Motor	Unit	1	15.620.000,00
11	Sepeda Motor	Unit	1	16.850.000,00
12	Sepeda Motor	Unit	1	16.850.000,00
13	Kursi Putar	Buah	2	1.120.000,00
14	Kursi Biasa	Buah	10	3.000.000,00
15	Meja Komputer	Buah	3	5.250.000,00
16	Kipas Angin	Unit	5	1.437.500,00
17	Alat Hiasan	Buah	1	199.900.000,00
18	PC Unit	Unit	1	7.763.333,00
19	PC Unit	Unit	1	7.763.334,00
20	Laptop	Unit	1	4.500.000,00
21	Printer	Unit	2	1.700.000,00
22	Printer	Unit	2	2.300.000,00
23	Mesin Absen (Time Recorder)	Unit	2	10.927.000,00
24	Rak Besi/Metal	Set	3	8.975.040,00
25	Filling Besi/Metal	Set	1	2.437.600,00
26	Kursi Putar	Buah	5	3.775.000,00
27	Kursi Putar	Buah	5	2.725.000,00
28	Meja Tamu	Buah	1	4.520.000,00
29	Mesin Potong Rumput	Buah	1	4.585.250,00
30	AC Unit	Unit	8	40.680.000,00
31	Internet	Set	1	51.235.000,00
32	Internet	Set	1	38.850.000,00
33	PC Unit	Unit	2	16.290.000,00
34	Laptop	Unit	1	9.058.750,00
35	Printer	Unit	6	6.966.888,00
36	Printer	Unit	1	6.026.420,00
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	5	10.750.000,00
38	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat Eselon II	Buah	1	12.037.500,00
39	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Set	1	3.022.000,00
40	Camera Electronic	Unit	1	3.027.497,00
41	Camera Film	Unit	1	14.905.000,00
42	Monumen/Bangunan Bersejarah Lainnya	M2	1	3.002.052.000,00
43	Tugu/Tanda Batas Lain-Lain	M2	1	99.980.000,00
44	Tugu/Tanda Batas Lain-Lain	M2	1	199.900.000,00

Kelemahan

Ketidak merataannya pembagian SDM antara Sekretariat dan Bidang - bidang serta masih kurangnya pelaksana yang potensial dibidangnya untuk terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur menyebabkan terlambatnya proses perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pelaporannya.

Anggaran yang tersedia belum cukup membiayai program/kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);

b. Lingkungan Eksternal

1. Program Nasional yang mendukung Program Pembangunan di Kota/Kabupaten.
2. Semakin besarnya kewenangan daerah untuk mengembangkan program Perumahan dan Permukiman
3. Ketersediaan lahan pengembangan permukiman penduduk
4. Meningkatnya kerjasama antar sektor antar daerah dan antar lembaga dalam penanganan kawasan permukiman
5. Potensi aset lahan daerah yang masih dapat digunakan dalam pengembangan PSU Perumahan .

Kelemahan

1. Keterbatasan database perumahan dan permukiman dan PSU yang valid dan mutakhir
2. Tingginya harga lahan untuk mengembangkan perumahan swadaya
3. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah sederhana sehat
4. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU)

Ancaman

Bencana Alam (longsor, banjir, cuaca ekstrim dan lain-lain).

Dari kondisi tersebut diatas baik secara eksternal maupun internal maka strategi yang ditempuh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah :

Meningkatkan ketersediaan Rumah Layah Huni dan Kawasan Permukiman yang berkualitas, dengan indikator :

1. Persentase (%) rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak
2. Persentase (%) kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
3. .Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan um
4. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator Nilai kepuasan masyarakat

Sedangkan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam jangka menengah adalah :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan, dengan indikator Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan indikator Persentase penurunan kawasan kumuh
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan indikator Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

2.4. RIVIEW RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun anggaran tahun 2022 sebesar 80.565.000.000 untuk urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk program terurai dalam 7 program dan 19 kegiatan Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja OPD. Dan untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya tetap berjalan sesuai dengan jalur yang ada sesuai petunjuk teknis dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum yang disyaratkan. Untuk lebih jelas tentang Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel 2.4.1: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Tabel 2,4,1
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
	Daerah dan Program / Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /	Sumber		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
					pagu indikatif	Dana			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
0	TOTAL								0
1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar								
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				74.016.465.000,00				74.016.465.000,00
1,04	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TERWUJUDNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Pemalang,		2.802.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100	2.802.005.000
1,04,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE TERWUJUDNYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Pemalang,	%	23.263.005.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	23.263.005.000
1.04 . 1.04.01 . 01,01	Perencanaan Penganggaran , dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Program Penunjang Urusan emerintah Daerah	Kab. Pemalang,		15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01,02	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran pengendalian ,laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran dan tugas fungsi OPD	Kab. Pematang, Sembawang,	dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
1.04 . 1.04.01 . 01,03	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah dokumen RKA tersusun	Kab. Pematang, Sembawang,	dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000
1.04 . 1.04.01 . 01,04	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah perubahan RKA tersusun	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000
1.04 . 1.04.01 . 01,05	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.	Jumlah dokumen DPA tersusun	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000
1.04 . 1.04.01 . 01,06	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.	Jumlah perubahan DPA tersusun	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000
1.04 . 1.04.01 . 01,07	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja tersusun	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	75.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01,08	7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah evaluasi kinerja Perangkat tersusun	Kab. Pemalang,	BULAN	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	55.000.000
1.04 . 1.04.01 . 01,02	Administrasi Keuangan Perangkat Darah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Darah	Kab. Pemalang,	BULAN	6.054.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	6.054.505.000
1.04 . 1.04.01 . 01,03	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah gaji dan tunjangan ASN terbayar	Kab. Pemalang,	BULAN	5.993.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.993.965.000
1.04 . 1.04.01 . 01,04	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah laporan akhir akhir Penyusunan tersusun	Kab. Pemalang,	dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	10.000.000
1.04 . 1.04.01 . 01,05	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.Tersusun	Kab. Pemalang,	BUAH	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.000.000
1.04 . 1.04.01 . 01,06	4. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Kab. Pemalang,	BULAN	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	2.500.000

1,04,1,04,01,01,03	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Terselenggaranya Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Pemalang,	BULAN	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.000.000
1,04,1,04,01,01,04	1. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD.	Tersusunnya Penilaian Barang Milik daerah SKPD.	Kab. Pemalang,	BULAN	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.000.000
1,04,1,04,01,01,05	2. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah SKPD.	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik daerah SKPD.	Kab. Pemalang,	bulan	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.000.000
1,04,1,04,01,01,06	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Kab. Pemalang,	bulan	165.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	
1,04,1,04,01,01,07	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya. \ tersedia	Kab. Pemalang,	paket	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	25.000.000
1,04,1,04,01,01,08	2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.	Kab. Pemalang,	BULAN	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.000.000
1,04,1,04,01,01,09	3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Jumlah Pegawai yang terlatih Berdasarkan Tugas dan Fungsi.	Kab. Pemalang,	BULAN	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	10.000.000

1,04,1,04,01,01,10	4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pemalang,	BULAN	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
1,04,1,04,01,01,11	5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	Kab. Pemalang,	BULAN	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	100.000.000
1,04,1,04,01,01,12	Administrasi Umum perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	Kab. Pemalang,	BULAN	495.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,15	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Kab. Pemalang,	BULAN	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000
1,04,1,04,01,01,16	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor.tersebut	Kab. Pemalang,	BULAN	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
1,04,1,04,01,01,17	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Peralatan Rumah Tangga. Tersedia	Kab. Pemalang,	BULAN	65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	65.000.000
1,04,1,04,01,01,18	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan.	Kab. Pemalang,	BULAN	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	60.000.000

1,04,1,04,01,01,19	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.tersedia	Kab. Pemalang,	BULAN	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	10.000.000
1,04,1,04,01,01,20	6. Penyediaan Bahan/Material.	Jumlah Bahan/Material tersedia	Kab. Pemalang,	DOKUMEN	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	50.000.000
1,04,1,04,01,01,21	7. Fasilitas Kunjungan Tamu.	Jumlah Kunjungan Tamu.	Kab. Pemalang,	DOKUMEN	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	25.000.000
1,04,1,04,01,01,22	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Kab. Pemalang,	PERBUP	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	200.000.000
1,04,1,04,01,01,23	1. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD tertata	Kab. Pemalang,	BULAN	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	15.000.000
1,04,1,04,01,01,24	2. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Jumlah aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. Tersedia	Kab. Pemalang,	dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.000.000

1,04,1,04,01,01, 07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Pematang, Sembawang,	Unit	33.936.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01, 07,02	1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapngan tersedia	Kab. Pematang, Sembawang,	unit	1.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.400.000.000
1,04,1,04,01,01, 07,03	2. Pengadaan Mebel.	Jumlah Mebeleur tersedia	Kab. Pematang, Sembawang,	unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
1,04,1,04,01,01, 07,04	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya.tersedia	Kab. Pematang, Sembawang,	unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
1,04,1,04,01,01, 07,05	4. Pengadaan Aset tetap Lainnya.	Jumlah Aset tetap Lainnya tersedia	Kab. Pematang, Sembawang,	unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
1,04,1,04,01,01, 07,10	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.				50.000.000				50.000.000
1,04,1,04,01,01, 07,06	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tersedia	Kab. Pematang, Sembawang,	unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000

1,04,1,04,01,01,07,07	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Daerah	Terlaksananya Jasa penunjang Urusan Daerah	Kab. Pemalang,	bulan	16.143.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,08	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Jasa Surat Menyurat.	Kab. Pemalang,	BULAN	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5.000.000
1,04,1,04,01,01,07,09	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Kab. Pemalang,	BULAN	15.850.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.850.000.000
1,04,1,04,01,01,07,10	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Kab. Pemalang,	BULAN	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
1,04,1,04,01,01,07,11	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Kab. Pemalang,	BULAN	238.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	238.000.000
1,04,1,04,01,01,07,12	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang,	BULAN	425.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	

1,04,1,04,01,01,07,13	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	30.000.000
1,04,1,04,01,01,07,14	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	30.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	30.000.000
1,04,1,04,01,01,07,15	3. Pemeliharaan Mebel.	Jumlah Pemeliharaan Mebel.	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	15.000.000
1,04,1,04,01,01,07,16	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	70.000.000
1,04,1,04,01,01,07,17	5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	20.000.000
1,04,1,04,01,01,07,18	6. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	100.000.000
1,04,1,04,01,01,07,19	7. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kab. Pematang, Sembawang,	BULAN	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	100.000.000

1,04,1,04,01,01,07,20	8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya.	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung gedung Kantor atau bangunan Lainnya.	Kab. Pemalang,	BULAN	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
1,04,1,04,01,01,07,21	9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.	Kab. Pemalang,	paket	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	10.000.000
1,04,1,04,01,01,07,22	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA/RELOKASI PROGRAM KAB/KOTA	Kab. Pemalang,	%	1.255.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,23	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau relokasi program Kab/kota	Terlaksananya Pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban Bencana atau relokasi program Kab/kota	Kab. Pemalang,	dokumem	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,24	1. Identifikasi perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.	Jumlah dokumen Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.	Kab. Pemalang,	dokumem	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
1,04,1,04,01,01,07,25	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/kota	Kab. Pemalang,	dokumem	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	

1,04,1,04,01,01,07,26	1. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP.	Kab. Pemalang,	dokumem	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000
1,04,1,04,01,01,07,27	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten /kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/kota	Kab. Pemalang,	Rumah,d okumen	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,28	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana terrehabilitasi	Kab. Pemalang,	Rumah	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	400.000.000
1,04,1,04,01,01,07,29	2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relakoasi Program Kabupaten/Kota.	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relakoasi Program Kabupaten/Kota.	Kab. Pemalang,	dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	50.000.000
1,04,1,04,01,01,07,30	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksanya Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang,	dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,31	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang,	dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.000.000

1,04,1,04,01,01,07,32	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Pemalang,	kali, dokumen	455.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	
1,04,1,04,01,01,07,33	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kab. Pemalang,	kali	255.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	255.000.000
1,04,1,04,01,01,07,34	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terpelihara	Kab. Pemalang,	dokumen	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	200.000.000
1,04,1,04,01,01,07,35	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pemalang,	rumah	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	
1,04,1,04,01,01,07,36	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan secara elektronik	Kab. Pemalang,	rumah	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	50.000.000

1,04,1,04,01,01,07,37	PERSENTASE KAWASAN KUMUH	Luas kawasan kumu dikurangi luas kumuh tertangani /luas kawasan kumuh x 100	Kab. Pemalang,		27.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,38	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Pemalang,	rumah	26.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,39	Perbaikan Rumah Tidak Layak huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak huni	Kab. Pemalang,	rumah	1.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	1.000.000.000
1,04,1,04,01,01,07,40	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kab. Pemalang,	rumah	25.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	25.500.000.000
1,04,1,04,01,01,07,41	PERSENTASE RUMAH LAYAK HUNI YANG DITANGANI	JUMLAH PERBAIKAN RUMAH LAYAK HUNI DI KAWASAN KUMUH	Kab. Pemalang,	%	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,42	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang,	rumah	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	

1,04,1,04,01,01,07,43	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Pemalang,	rumah	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	5.000.000.000
1,04,1,04,01,01,07,44	PERSENTASE PSU DALAM KONDISI BAIK	JUMLAH LINGKUNGAN YANG DIDUKUNG DENGAN PSU/ JUMLAH PSU DALAM KONDISI BAIK	Kab. Pemalang,	%	30.700.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,45	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggara PSU Perumahan	Kab. Pemalang,	Paket	15.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	
1,04,1,04,01,01,07,46	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kab. Pemalang,	paket	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	300.000.000
1,04,1,04,01,01,07,47	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian tersedia	Kab. Pemalang,	paket	15.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	15.000.000.000
1,04,1,04,01,01,07,48	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kab. Pemalang,	paket	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100%	100.000.000

1,1	URUSANPEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN PERTANAHAN	TERWUJUDNYA PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN	Kab. Pemalang,			Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kab. Pemalang,	%	300.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	
2,04, 1,04,01,01, 18	PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Terlaksananya PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kab. Pemalang,		300.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	
2,04, 1,04,01,01, 18,02	Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Mediasi Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Kab. Pemalang,	DOKUMEN	300.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	300.000.000
2,04, 1,04,01,01, 18,03	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE SERTIVIKASI HAK ATAS TANAH	Kab. Pemalang,	%	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	
2,04, 1,04,01,01, 26	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten	Terlaksananya Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten	Kab. Pemalang,		200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	

2,04, 1,04,01,01, 26,01	koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	jumlah koordinasi dan Sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Kab. Pemalang,	DOKUMEN	200.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100%	200.000.000
----------------------------	---	---	-------------------	---------	-------------	--	--	------	-------------

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA 2020 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN PEMALANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Tinjauan kebijakan nasional mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025. Pada periode 2010-2014 RPJMN merupakan kelanjutan dari RPJMN I dan II dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing perekonomian.

Dukungan peningkatan daya saing perekonomian terkait bidang infrastruktur nasional adalah pengembangan jaringan transportasi, penerapan inovasi teknologi yang memanfaatkan energi terbarukan, pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman sejalan dengan pengembangan secara berkelanjutan industri kelautan, pengelolaan energi alam dan sumber daya mineral.

Pembangunan berkelanjutan diwujudkan dengan program rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memelihara sekaligus memanfaatkan kekayaan hayati dan sumber daya alam khas wilayah tropis dalam kerangka peningkatan daya saing bangsa dan sebagai modal pembangunan ke depan. Disamping pemantapan kelembagaan

dan kemampuan mitigasi bencana diantara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan tersebut didukung dengan perencanaan tata ruang yang semakin baik dan menyatukannya terhadap dokumen perencanaan pembangunan serta diikuti dengan penegakan peraturan-peraturan untuk pengendaliannya.

Disamping kebijakan nasional pembangunan, perlu kiranya memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2020 dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah :

Meningkatkan ketersediaan Rumah Layah Huni dan Kawasan Permukiman yang berkualitas, dengan indikator :

1. Persentase (%) rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak
2. Persentase (%) kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum, dengan indikator : Persentase (%) kepastian hukum atas bidang tanah
4. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah dengan indikator Nilai kepuasan masyarakat

Sedangkan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam jangka menengah adalah :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan, dengan indikator Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan indikator Persentase penurunan kawasan kumuh
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dengan indikator Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang

Tujuan dan sasaran Disperkim Kabupaten Pemalang merupakan tindak lanjut dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang dalam 5 tahun ke depan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang terkait dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL, MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGENI"**

Disperkim terkait dengan misi keenam yaitu **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Kuat Dan Berkesinambungan**. Dengan demikian seluruh kerangka kerja logis urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan mulai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan, berikut indikator kinerjanya ditujukan untuk mendukung dan mensukseskan misi keenam tersebut.

Tujuan dan sasaran dari RPJMD terkait misi keenam tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tujuan dan sasaran di tingkat Disperkim Kabupaten Pematang Jaya sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan cakupan universal akses melalui peningkatan pelayanan peningkatan penanganan kawasan kumuh

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini yaitu :

1. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan
2. Meningkatnya penanganan RTLH
3. Berkurangnya sengketa tanah garapan
4. Meningkatnya sertifikasi kepemilikan hak atas tanah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor- faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan pembangunan infrastruktur daerah, dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis yang berorientasi untuk menghasilkan infrastruktur daerah yang berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022, seperti yang

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021 – 2026 untuk program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
						2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatkan cakupan universal akses	Persentase luasan kawasan kumuh	Bekurangnyanya kawasan kumuh perkotaan	Persentase kawasan kumuh tertangani	%	NA	53.5	63.5	73.5	83.5	93.5	98
			Persentase Cakupan wilayah kumuh di bawah 10 ha	%	1,3	1.0	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1
			Persentase kawasan permukiman yang memiliki PSU dalam kondisi baik	%	NA	50	60	70	80	90	100
		Meningkatnya penanganan RTLH	Persentase RTLH yang tertangani	%	21,67	25	29	33	37	41	45
			Persentase rumah layak huni bagi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah layak huni bagi korban/relokasi program	%	100	100	100	100	100	100	100
		Berkurangnya sengketa	Persentase tanah garapan tertangani	%	NA	30	40	60	70	80	100

		tanah garapan									
		Meningkatnya sertifikasi kepemilikan hak atas tanah	Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	%	NA	60	85	95	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja dan Pendanaan ini merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Program dan kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang tahun 2022 seperti dalam lampiran tabel 3.3.1

Tabel 3.3.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Pematang Jaya**

Kode	Kategori	Sub Kategori	Indikator Kinerja	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gaji ASN Terbayarkan Jumlah Tukin ASN yang terbayarkan	Terlaksananya Kegiatan admnistrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Pematang Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	14 Bulan 12 Bulan	100 %	5,993,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,993,965,000
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah honor pengelola keuangan	Terlaksananya Kegiatan admnistrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Pematang Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Orang	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	75,000,000
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen yang terverifikasi	Terlaksananya Kegiatan admnistrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Pematang Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah koordinasi yang terlaksana	Terlaksananya Kegiatan admnistrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Pematang Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 %	10,000,000			Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Kegiatan admnistrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Pematang Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
1	04	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah tanggapan	Terlaksananya Kegiatan admnistrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Pematang Jaya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tanggapan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000

1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen	Terlaksananya Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000
1	04	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsata	100 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2,500,000
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								79,000,000				79,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
1	04	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	15 barang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
1	04	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan penilaian BMD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsaba	100 %	4 Kegiatan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000
1	04	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Kegiatan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000
1	04	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laporan yang tersusun	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,000,000
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,000,000
1	04	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Barang	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,000,000
1	04	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								22,000,000				22,000,000
1	04	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen yang tersusun	Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan pendapatan secara berkala	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	12,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah obyek yang terdata	Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan pendapatan secara berkala	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Obyek	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000
1 04 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan	Terlaksananya penatausahaan dan pelaporan pendapatan secara berkala	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								173,000,000					173,000,000
1 04 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	0	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Kaos Olahraga/Lapangan Wear Pack	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsbata	100 %	50 Pasang 25 Pasang	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
1 04 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Dokumen	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000
1 04 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	0	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 0	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0
1 04 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Monev yang terlaksana Jumlah Rapat Kepegawaian	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsbata	100 %	4 Kegiatan 5 Kali	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000
1 04 01 2.05 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kegiatan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongbata	100 %	15 Orang	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
1 04 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongbata	100 %	4 Kegiatan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
1 04 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti bintek	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongbata	100 %	40 Orang	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,000,000
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								495,000,000					495,000,000
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Buah	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan Kursi Rapat Jumlah Pengadaan TV	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 unit 1 unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah isi tabung gas Jumlah Pengadaan Lemari Jumlah Pengadaan Rak	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Buah 2 Buah 1 Buah	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	65,000,000
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah alat tulis kantor yg tersedia Jumlah pencetakan Jumlah Penggandaan (Fotocopy)	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Buah 1 Paket 52490 Lembar	100 %	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	60,000,000
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Koran dan Majalah Tersedia	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Tahun	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BBM yang tersedia Jumlah Pelumas yang tersedia	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2502 Liter 287 Liter	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
1.04.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Jamuan makan ringan/besar Jumlah Perjalanan Dinas dalam Kota	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	332 Orang 140 OH	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25,000,000
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	bbm Jasa Jalan Tol Jumlah perjalanan dinas dalam kota Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	500 Liter 11875 Km 135 oh 230 oh	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	200,000,000
1.04.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah almari tersedia	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Buah	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
1.04.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah mesin absensi tersedia	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsbata	100 %	1 Buah	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,650,000,000					1,650,000,000
1.04.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	0	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsbata	100 %	0 0	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0
1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Mobil Tangki Penyiram Air	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	1 Unit	100 %	1,400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,400,000,000
1.04.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	0	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsbata	100 %	0 0	100 %	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Meja Kursi Staff	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Buah 16 Buah	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah HT dan CCTV Jumlah potong rumput dan tablet pc	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Unit 8 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
1.04.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah laptop Peralatan Komputer	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Unit 23 Buah	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Pembangunan Gedung	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
1.04.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Penataan ruang rapat dan sunblast jendela kantor	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongbata	100 %	1 Paket	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								16,143,000,000					16,143,000,000
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Materai	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1000 Lembar	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	5,000,000
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Pembayaran tagihan rekening LPJU	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan	100 %	15,850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,850,000,000
1.04.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pemeliharaan AC dan PC	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	167 Kali	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah tenaga administrasi	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsata	100 %	19 Orang	100 %	238,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	238,000,000
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							425,000,000				425,000,000		
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Buah	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30,000,000
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Buah	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30,000,000
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Buah	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15,000,000
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	44 Buah	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	70,000,000
1 04 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa pemeliharaan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	20,000,000
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa pemeliharaan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsata	100 %	10 Orang	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,000,000
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongsata	100 %	2 gedung	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.04.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa pemeliharaan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	50,000,000
1.04.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	Pemeliharaan taman kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,000,000
1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								1,255,000,000					1,255,000,000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								100,000,000					100,000,000
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah lokasi yang diidentifikasi	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	10 titik	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	50,000,000
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	2 Kegiatan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	50,000,000
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								75,000,000					75,000,000
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah kegiatan sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	2 Kegiatan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	50,000,000
1.04.02.2.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	2 Kegiatan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	25,000,000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								500,000,000					500,000,000
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah rumah korban bencana yang direhab	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojonegara	70 %	30 Rumah	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	400,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah DED Rumah korban bencana	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongbata	70 %	1 Paket	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	50,000,000	
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah rumah yang terbangun	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Pemalang, Pemalang, Semua Kelurahan	70 %	3 Unit	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	50,000,000	
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					75,000,000								75,000,000	
1	04	02	2.04	01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah kegiatan	Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	10 Kegiatan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	50,000,000	
1	04	02	2.04	02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah kegiatan penatausahaan serah terima rumah bencana	Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongbata	70 %	10 Kegiatan	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	25,000,000	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					455,000,000								455,000,000	
1	04	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah fasilitas yang diberikan	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongbata	70 %	10 Buah	100 %	255,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	255,000,000	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	terlaksananya penatausahaan rusunawa	Terlaksananya Pembinaan Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1 Paket	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	200,000,000	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan					50,000,000								50,000,000	
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	Jumlah fasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan secara elektronik	Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Pemalang, Pemalang, Bojongbata	70 %	50 Kali	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penduduk yang sudah memiliki rumah	70 %	50,000,000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					27,050,000,000								27,050,000,000	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman					100,000,000									100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	04 03 2.01 03		Jumlah koordinasi dan pengendalian		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Koordinasi		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
1	04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						250,000,000						250,000,000
1	04 03 2.02 02		Jumlah kegiatan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
1	04 03 2.02 03		Jumlah kegiatan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		50,000,000					50,000,000
1	04 03 2.02 04		Jumlah kegiatan		Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Kegiatan		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100,000,000
1	04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						26,700,000,000					26,700,000,000	
1	04 03 2.03 01	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah paket yang tersedia	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	4 Paket	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh	40 %	200,000,000
1	04 03 2.03 02	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah rumah yang diperbaiki	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	50 Unit	100 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh	40 %	1,000,000,000
1	04 03 2.03 03	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah rumah dan PSU yang di perbaiki	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	2 Paket	100 %	25,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Capaian Penanganan Kawasan Kumuh	40 %	25,500,000,000
1	04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						5,000,000,000					5,000,000,000	
1	04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						5,000,000,000					5,000,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase capaian perbaikan rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh	Jumlah Rumah tidak layak huni dan pendampingan BSPS dan Bankeu	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	20 Rumah	100 %	5,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase capaian perbaikan rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh	50 %	5,000,000,000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							15,400,000,000						15,400,000,000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan							15,400,000,000							15,400,000,000
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase terbangunnya PSU yang sesuai standar	Jumlah pralap	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	4 Paket	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terbangunnya PSU yang sesuai standar	50 %	300,000,000	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase terbangunnya PSU yang sesuai standar	Jumlah PSU yang di bangun di pelihara	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 Paket	100 %	15,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terbangunnya PSU yang sesuai standar	50 %	15,000,000,000	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase terbangunnya PSU yang sesuai standar	Jumlah koordinasi	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	10 Koordinasi	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terbangunnya PSU yang sesuai standar	50 %	100,000,000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							550,000,000							550,000,000
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN							350,000,000							350,000,000
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							350,000,000							350,000,000
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah yang Diselesaikan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Mediasi Penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan,fasilitas penyelesaiankonflik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	1 Kegiatan	100 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sengketa Tanah yang Diselesaikan	50 %	50,000,000	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah yang Diselesaikan	Jumlah mediasi	Jumlah Mediasi Penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan,fasilitas penyelesaiankonflik	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	20 Kegiatan	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sengketa Tanah yang Diselesaikan	50 %	300,000,000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH							200,000,000							200,000,000
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							200,000,000							200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
									Program	KeluaranSub Kegiatan	Hasil Kegiat an					Tolok Ukur	Target
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Tercapainya Penatagunaan Tanah	Jumlah koordinasi	Terlaksananya Kegiatan Penggunaan Tanah yang hamparan dalam satu daerah kab/kota	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	35 Kegiatan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Tercapainya Penatagunaan Tanah	50 %	200,000,000
TOTAL												74,568,465,000			74,568,465,000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2022 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renja memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2021 tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Namun demikian salah satu kendala penting dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang berdasarkan tugas dan fungsinya adalah kurangnya anggaran yang dialokasikan. Hal ini terlihat dari usulan kegiatan yang begitu banyak tetapi yang dialokasikan setiap tahunnya hanya sedikit yang terakomodir.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terbitnya permendagri No. 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Didalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang. Hal ini dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Didalam penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2022, masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri No.54 tahun 2010 sedangkan pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda;
3. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pematang Jaya tahun 2022 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur padahal selama ini anggaran yang disediakan untuk itu sangatlah terbatas; 2. Menerapkan system *reward and punishment* terhadap seluruh staf dan mengaplikasikan pada pendistribusian pekerjaan secara merata;
2. Dalam Rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif didalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna;
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Perubahan Renja DISPERKIM 2022 yang akan terwujud dalam Renja Perubahan Dinas Perumahan dan kawasan permukiman kabupaten Pemalang 2022.

Pemalang, Juli 2021

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PEMALANG
KABID JAKON CIPTATARU DPUTR

SUPRIYANTO, ST, MA

Penata Tk. I

NIP. 19680110 198809 1 001